



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025

**DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	43
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	50
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	55
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat	68
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	69
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	69
3.2 Tujuan dan Sasaran	69
3.3 Program dan Kegiatan	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	158
BAB V PENUTUP	179

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada RPD 2024-2026. Dokumen Renja Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sejalan dengan tujuan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing ;
2. Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

1. Persiapan penyusunan :

Meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2023, pengendalian kegiatan tahun 2024.

2. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, meliputi :

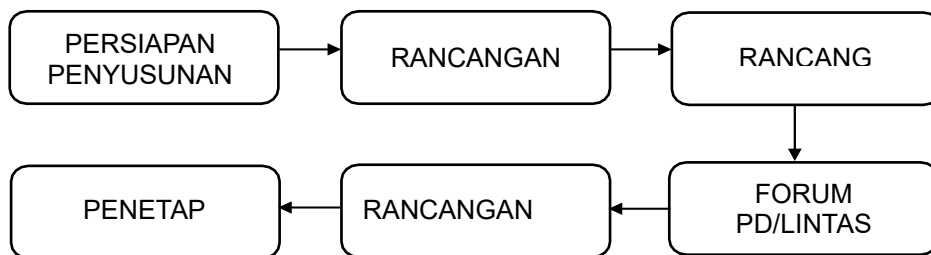
- a. Pengolahan data dan informasi ;
- b. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah ;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah ;
- j. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- k. Pembahasan forum Perangkat Daerah;

3. Penyusunan rancangan

Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2025, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang;

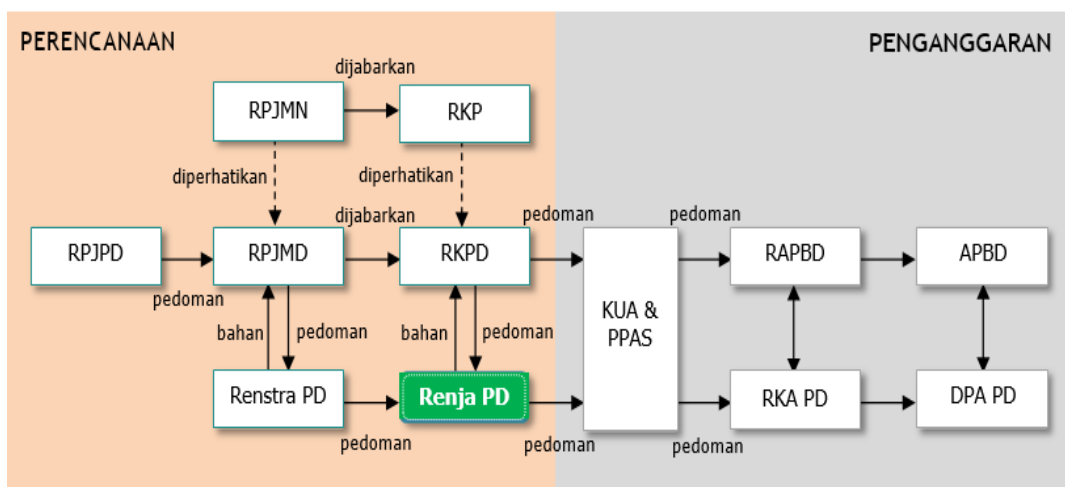
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir;
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang



Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah penjabaran dari Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk PEMBERDAYAAN Perempuan dan Perlindungan Anak 2024-2026, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW);
4. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1985 tentang Hak-Hak Politik Perempuan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang ;
28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2024) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra OPD berdasarkan target program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja PD, serta Program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun n+1

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kualitas Renja-PD yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra-PD. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi target pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan / permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2024 terhadap target kinerja Tahun 2024. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2023 dengan kinerja Tahun 2023 (tahun ke-lima).

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023,

dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata target fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 target capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Periode 2018 – 2023 Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
					RENSTRA 2018 – 2023						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	90%	90%	90%	100%
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan	100%	0%	100%	100%	100%
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Target Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan	33 Orang	33%	37 Orang	37 Orang	100%
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Target Anggaran	Jumlah Laporan yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik yang Disediakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan Jumlah jenis barang pendukung penyediaan jasa surat menyurat jumlah tenaga administrasi yang di pekerjakan	20 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
						Jumlah Jenis Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Disediakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%
						Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang Disediakan	20 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100%
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat Dinas yang Disediakan	1000 Ok	800%	800%	800%	100%
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Diikuti	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	100%
1	06	01	2.06	10	Penataan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang tertata	1 Tahun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	6 jenis	0%	0%	0%	0%
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	5 Rekening	5 Rekening	5 Rekening	5 Rekening	100%
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penjaga Malam yang Dipekerjakan	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	100%
						Jumlah Tenaga Administrasi yang Dipekerjakan	8 Orang	8 Orang	8 Orang	8 Orang	100%
						Jumlah unut gedung yang digaja dan dibersihkan	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit	100%
						Jumlah Tenaga Harian Sopir yang Dipekerjakan	7 Orang	7 Orang	7 Orang	7 Orang	100%
						Jumlah Tenaga Kebersihan yang Dipekerjakan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100	100	100	100	100%
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	48 unit	48 unit	48 unit	48 unit	100%
						Jumlah kendaraan Dinas Roda Dua yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	35 Unit	35 Unit	100%
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda Empat yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda Enam yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100%
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100%
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%
						Rehab sedang kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%
											100%
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Kelembagaan sosial yang aktif	100%	97%	100%		
										100%	100%
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS dan kelembagaan sosial yang dibina	100%	5PSPK	100%		
										100%	100%
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSM dan TSKS yang dibina	94 orang	93orang	94 orang	94 orang	100%
						Jumlah peserta pelatihan Peningkatan SDM PSM	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100%
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok KUBE FM yang dibina dan difasilitasi	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	100%
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah galeri PKK yang dibuat	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	100%
						Jumlah DPD LPM yang difasilitasi pelaksanaan kegiatannya	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
						Jumlah Inovasi TTG yang Dibuat	6 Inovasi	6 Inovasi	6 Inovasi	0%	100%
						Jumlah karang taruna yang dibina	19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	100%
						Jumlah kelompok dasawisma aktif	685 Kelompok	685 Kelompok	685 Kelompok	685 Kelompok	100%
						Jumlah kelompok dasawisma yang mengikuti lomba dasawisma berprestasi	19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	100%
						Jumlah kelompok PKK yang mengikuti Jambore	19 Kelompok	0 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	100%
						Jumlah kelompok PKK yang mengikuti lomba gerakan PKK	19 Kelompok	0 Kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	100%
						Jumlah kelurahan yang mengikuti BBGRM	16 Kelurahan	1 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan	100%
						Jumlah LKKS yang aktif	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
						Jumlah LKS, LKSA, Posdaya dan Legiun Veteran yang dibina	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
						Jumlah LPM yang dinilai	16 Lembaga	0 Lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	100%
						Jumlah peserta sarasehan dan temu ramah pada peringatan hari pahlawan	45 Orang	0 Orang	45 Orang	45 Orang	100%
						Jumlah Pokjanal Posyandu yang dibina	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100%
						Jumlah Posyantek yang dibina	2 Posyantek	2 Posyantek	2 Posyantek	2 Posyantek	100%
						Jumlah Veteran dan Janda Veteran yang diberikan paket sembako	27 Orang	27 Orang	27 Orang	27 Orang	100%
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase penanganan kasus kelayan	100%	100%	100%	100%	100%
						Jumlah operasional petugas LK3 yang disediakan	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%
											100%
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase lansia terlantar yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase penanganan anak terlantar dan anak jalanan	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase pelayanan penanganan gelandangan, pengemis, PSK dan korban penyalahgunaan NAPZA	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penanganan terhadap orang terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase masyarakat kurang mampu yang melakukan isolasi mandiri Covid-19 yang dibantu	100%	100%	100%	100%	100%
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Kelayan yang Dirujuk	55 kelayan	100	55 kelayan	57 kelayan	103.64
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah kegiatan kreatifitas lansia yang difasilitasi	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS yang dijangkau dalam penyediaan paket permakanan sesuai standar gizi, paket sandang dan yang memanfaatkan alat bantu	55%	53%	55%	51%	99.17
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Permakanan	283 orang	280 orang	100 orang	151	151

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
						Jumlah penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan	259 orang	644 orang	50 orang	244	488
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah Lansia Terlantar yang Menerima Bantuan Sandang	283 orang	280 orang	100 orang	151	151
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang Disediakan	1 Paket	10%	1 Paket	0	0
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Healing yang Terfasilitasi	1 Unit	1unit	1 Unit	1	100
						Jumlah Rumah Singgah yang Terfasilitasi	1 Unit	1unit	1 Unit	1	100
1	06	04	2.02	14	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rumah Kreatifitas Disable yang Terbentuk	1 Unit	0 unit	0 Unit	0	0
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penurunan KK miskin	4.00%	3.00%	4.00%	4	100
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	8	4 layanan	8	8	100
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dibuat dan dimutakhirkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1	100
						Jumlah dokumen DTKS yang diterbitkan	1 Dokumen	1%	1 Dokumen	1	100
						Jumlah Unit Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikembangkan	7 unit	7 unit	7 unit	7	100
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Graduasi	8%	7%	10%	3	30
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok KUBE yang Dibina	13 Kelompok	13 Kelompok	13 Kelompok	13	100
						Jumlah Kelompok KUBE e-WARONG yang Dibina	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	4 Kelompok	100
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100	100
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	44 orang	30 orang	30 orang	30	100
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan bagi masyarakat yang terkena bencana pada dapur umum lapangan paska bencana korban bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100	100
						Jumlah Taruna Siaga Bencana yang Dibina	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25	100
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang dipelihara	100%	100%	100%	100	100

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
1	06	07	2.02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100
1	06	07	2.02	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	6%	9%	11%	12	109
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan aktif Jumlah buku profil gender yang di buat	100% 1 dokumen	0% 1 dokumen	100% 1 dokumen	100 1 dokumen	100
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah dokumen profil gender dan anak yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100
						Jumlahpeserta bimtek bagi tim PPRG dalam percepatan PUG	118 orang	118	118 orang	118 orang	100
						Jumlah peserta sosialisasi PUG (Pokja, Fokal Poin, Kecamatan kelurahan)	101 orang	-	101 orang	101 orang	100
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	26 organisasi	-	26 organisasi	26 organisasi	100
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan rutin yang dilaksanakan	12	-	12	12	100
						Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar yang Dilaksanakan	3	-	3	3	100
						Jumlah pengurus dan anggota organisasi perempuan yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas pengurus organisasi perempuan	78	-	78	78	100
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang tepenuhi sesuai standar	75%	80%	73%	73%	
						Persentase forum anak yang aktif	52.63	47.40	52.63		
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah yang menginisiasi SRA	70%	70%	70%	70%	
						Jumlah fasilitasi kesehatan yang menginisiasi PRA	80%	80%	80%		
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi yang Dilaksanakan (KLA, PRA, SRA)	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		
						Jumlah Gugus Tugas KLA yang Mengikuti Bimtek	30 Orang	30 Orang	30 Orang		
						Jumlah Pertemuan Gugus Tugas KLA yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	1 kegiatan	4 Kegiatan		
						Jumlah peserta Desimininasi informasi tentang pola asuh anak pada pengasuhan alternatif di boarding school	60	-	60		
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Anak yang dibina	19%	.-			
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta capacity bulding forda Jumlah peserta pemilihan duta anak	30 orang 52 orang	-	30 orang 52 orang		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus anak korban kekerasan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan dari petugas terlatih	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Anti Kekerasan perempuan dan anak yang Terbentuk	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100%
						Jumlah Pertemuan yang Dilaksanakan	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Pencegahan Terhadap Anak	90 Orang	-	90 Orang	90 Orang	100%
						Jumlah PATBM yang terbantu	16 PATBM	16 PATBM	16 PATBM	16 PATBM	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
						Jumlah kader PATBM yang dibina	80	-	80	80	100%
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah OPD yang memanfaatkan data basis bangga kencana sebagai acuan perencanaan	24	24	23	23	100%
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Guru yang Mengikuti Orientasi Pembentukan Sekolah Peduli Kependudukan	20 Orang	40 orang	20 Orang	20 Orang	100%
						Jumlah Sekolah Peduli Kependudukan yang Terbentuk	10 Sekolah	-	10 Sekolah	10 Sekolah	100%
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	70%	70%	70%		100%
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data yang Terbentuk	6 Unit	0%	6 Unit	6 Unit	100%
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan yang Dibuat	12 Laporan	1 laporan%	12 Laporan	12 Laporan	100%
						Jumlah Operator Statistik rutin	2 Orang	2 orang	2 Orang	2 Orang	100%
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet Need	22,5%	25%	22,5%	13.55	166.67
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah PKB yang dibina	8	8	8	7	87.5
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Pertemuan Kader IMP dan PLKB yang Dilaksanakan	12 Kegiatan	-	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%
						Jumlah kader IMP yang mengikuti kegiatan refitalisasi Program Bangga Kencana dan pencegahan stunting	50	-	50	50	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
									Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
					Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakat peduli KB yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
					Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pelayanan KB yang Dilaksanakan dalam Momen-momen Strategis	4 Kegiatan	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga sasaran tribina yang ber KB	70.55%	57.00%	56.71%	89.46	157.75
						Persentase kelompok PIK R yang aktif	75.00%	-	75.00%		
						Persentase PUS keluarga sasaran BKB yang memperoleh pendampingan 1000 HP kelahiran	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%
						Persentase kelompok PIK Remaja yang mendapat fasilitas dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	100.00%	-	100.00%	100.00%	100.00%
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Ketahanan Keluarga yang Diberikan Insentif	223 orang	22 orang	223 orang	223 orang	100.00%
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Finalisasi Duta Genre Tk. Kota	40 Orang	-	40 Orang	40 Orang	100.00%
						Jumlah Gelar Dagang yang Diikuti	2 Kegiatan	-	0 Kegiatan	0 Kegiatan	100.00%
						Jumlah Kegiatan GenRe yang Difasilitasi	2 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%
						Jumlah Lomba Bangsa Kencana yang Dilaksanakan	8 Kegiatan	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100.00%
					Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase stakeholder yang terlibat dalam percepatan penanggulangan stunting	100	-	100	100	100.00%
					Promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja	Jumlah kader yang mengikuti workshop penanggulangan stunting	60	0	60	60	100.00%
						Jumlah peserta yang mengikuti rakor stunting	70	0	70	70	100.00%

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Realisasi dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)		
					Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah rapat evaluasi percepatan penanguulangan penurunan stunting	4 kali	0	4 kali	4 kali	100.00%

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 1 urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan realisasi sebesar 98.22 %. Dengan realisasi program dan Kegiatan sebagai Berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi (99.22%);
- 2) Program Pemberdayaan Sosial, dengan realisasi sebesar (95.96%);
- 3) Program Rehabilitasi Sosial, dengan realisasi sebesar (94.06%);
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan realisasi sebesar (99.77%);
- 5) Program Penanganan Bencana dengan realisasi sebesar (92.76%);
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan realisasi (88.31%).

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan realisasi (73.17 %) dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 urusan Bidang yaitu

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi sebesar 94,09%, Dengan realisasi program dan Kegiatan sebagai Berikut:

- 1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan realisasi (93.35%);
- 2) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan (96.62%);
- 3) Program Perlindungan Khusus Anak, dengan realisasi (100%):

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dengan realisasi 69.10%, dengan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan realisasi (35.84%);
- 2) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan realisasi (94.22%).

Tabel 2.2
Target dan Perkiraan Realisasi Pencapaian Renstra Periode 2024 - 2026 Perangkat Daerah
Kota Padang Panjang

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
					RENSTRA 2024-2026				
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada perangkat daerah	100 %	100 %	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100%
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	518 Orang/bulan	518 Orang/bulan	100%
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 Paket	37 Paket	100%
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100%
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalsi listrik/penerangan bangunankantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100%
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100%
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	100%
1	06	01	2.07		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100%
1	06	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	0 Unit	0 Unit	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	06	01	2.08		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	100%
1	06	01	2.08	0002	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%
1	06	01	2.08	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	100%
1	06	01	2.09		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100%
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100%
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100%
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 %	100 %	100%
1	06	01	2.09	0009	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	100%
1	06	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	27 Unit	100%
1	06	02	2.03		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	55 Unit	55 Unit	100%
1	06	02	2.03	0001	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100%
1	06	02	2.03	0002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	85 %	85 %	100%
1	06	02	2.03	0004	Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	150 Lembaga	150 Lembaga	100%
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	92 Orang	92 Orang	100%
1	06	04			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	06	04	2.01		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	60 Lembaga	100%
1	06	04	2.01	0001	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	5 Sertifikat	5 Sertifikat	100%
1	06	04	2.01	0002	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Tertangani	90 %	90 %	100%
1	06	04	2.01	0003	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	750 Orang	100%
1	06	04	2.01	0005	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	459 Orang	459 Orang	100%
1	06	04	2.01	0006	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75 Orang	75 Orang	100%
1	06	04	2.02		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22 Orang	22 Orang	100%
1	06	04	2.02	0003	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	100%
1	06	04	2.02	0004	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50 Orang	50 Orang	100%
1	06	04	2.02	0005	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2792 Orang	2792 Orang	100%
1	06	04	2.02	0007	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	100%
1	06	04	2.02	0014	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75 Orang	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	06	05			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	100%
1	06	05	2.02		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	100%
1	06	05	2.02	0001	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
1	06	05	2.02	0003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %	100%
1	-	05	2.02	0004	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 Layanan	17 Layanan	100%
1	06	06			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2069 Orang	2069 Orang	100%
1	06	06	2.01		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1034 Keluarga	1034 Keluarga	100%
1	06	06	2.01	0001	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	130 Orang	100%
1	06	06	2.01	0002	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %	100 %	100%
1	06	06	2.01	0005	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 %	100 %	100%
1	06	06	2.02		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300 Orang	100%
1	06	06	2.02	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300 Orang	100%
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	300 Orang	300 Orang	100%
1	06	07			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	30 Orang	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	06	07	2.01		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30 Orang	30 Orang	100%
1	06	07	2.01	0002		Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	0 Unit	0 Unit	100%
2					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara	100 %	100 %	100%
2	08				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	98 Makam	100%
2	08	02			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	98 Makam	100%
									100%
2	08	02	2.01						100%
					PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	100 Persen	100%
2	08	02	2.01	0004		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen	20 Persen	100%
2	08	02	2.02		Pelebagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	23 OPD	100%
2	08	02	2.02	0003		Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	23 OPD	100%
2	08	02	2.03		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	100%
					Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 %	50 %	100%
2	08	02	2.03	0003	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	26 Lembaga	26 Lembaga	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
2	08	03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen	100 persen	100%
2	08	03	2.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan (Lembaga)	12 Lembaga	12 Lembaga	100%
2	08	03	2.01	0001	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
2	08	03	2.02		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	100%
2	08	03	2.02	0002	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
2	08	03	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
2	08	03	2.03	0004	Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100%
2	08	06			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	12 layanan	12 layanan	100%
2	08	06	2.01		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	10 Layanan	100%
2	08	06	2.01	0002	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 %	85 %	100%
2	08	06	2.02		Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	40 Lembaga	40 Lembaga	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
					Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
2	08	06	2.02	0001	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase forum anak aktif	80%	80%	100%
						Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen	100 Persen	100%
						Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen	100 Persen	100%
2	08	07			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	35 Orang	35 Orang	100%
2	08	07	2.01		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	08	07	2.01	0004					100%
2	08	07	2.01	0005	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 BTJ	100 BTJ	100%
2	08	07	2.02		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti	30 Lembaga	30 Lembaga	100%
2	08	07	2.02	0005	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	10 Orang	100%
2	08	07	2.02	0006	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	14				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 %	100 %	100%
					Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	12 Orang	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
2	14	02			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	12 Orang	100%
2	14	02	2.01		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang mengikuti penguatan dan pengembangan kapasitas	8 Lembaga	8 Lembaga	100%
2	14	02	2.01	0019	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	10 Orang	100%
2	14	02	2.02						100%
2	14	02	2.02	0015	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 %	100 %	100%
					Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah/Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabuapten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Non Formal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	30 Kegiatan	30 Kegiatan	100%
2	14	03			Sosialisasi tentang Pemanfaatan kajian tentang dampak kependudukan beserta model solusi strategi sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	40 Organisasi	40 Organisasi	100%
2	14	03	2.01		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	100%
					Pemetaan Perkiraan pengendalian Penduduk cakupan daerah Kabuapten/kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 Unit	16 Unit	100%
					pengolahan dan pelaporan Data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	14	03	2.02		Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	16 Unit	16 Unit	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	12 Laporan	12 Laporan	100%
2	14	03	2.02	0005					100%
2	14	03	2.04		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR	67 %	67 %	100%
2	14	03	2.04	0001	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2434 Orang	2434 Orang	100%
					Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	14	04			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
2	14	04	2.01		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	30 Organisasi	100%
					Pendayaangunaan Tenaga Penyuluh KB (Petugas Lapangan KB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 Orang	99 Orang	100%
2	14	04	2.01	0008	Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 Orang	88 Orang	100%
2	14	04	2.02		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan olehPKB/PLKB	40 Organisasi	40 Organisasi	100%
2	14	04	2.02	0003	Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakat tingkat Daerah Kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB.	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50 %	50 %	100%
2	14	04	2.02	0004	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67 %	67 %	100%

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023) dan Renstra 2024-2026	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target program dan kegiatan Renja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Realisasi Renstra Tahun 2024	
								Target Capaian Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi (%)
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 Kelompok	114 Kelompok	100%
					Promosi dan sosialisasi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	3 Laporan	3 Laporan	100%
2	14	04	2.01	0008	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,,PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	223 Kader	223 Kader	100%
2	14	04	2.02		Orientasi/Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R danPemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	100%
2	14	04	2.02	0003	Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Unit	1 Unit	100%
2	14	04	2.02	0004	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 %	100 %	100%
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	23 Organisasi	100%
					Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan	100%

Berdasarkan Tabel 2.2 Target dan Pencapaian Renstra 2024 - 2026 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan 2 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang terdiri dari 1 urusan Pemerintahan Bidang Sosial Target program dan Kegiatan sebagai Berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Target (100%);
2. Program Pemberdayaan Sosial, dengan Targei sebesar (80 %);
3. Program Rehabilitasi Sosial, dengan target sebesar (90%);
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan target sebesar (87.97%);
5. Program Penanganan Bencana dengan target sebesar (92.76%);
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, dengan target (100%).

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang yang terdiri dari 2 urusan Bidang yaitu

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan target program dan Kegiatan sebagai Berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, dengan target (100%);
2. Program Perlindungan Perempuan dengan target (100 BJT);
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan (83%);
4. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan target (100 BJT):

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadengan target program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan target 100 %);
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan target (65%);
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan target (65%).

i. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2023. Rincian dari pagu beserta target Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan anggaran tahun 2024 beserta perkiraan target target anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Renja Perangkat Daerah dan erkiraan Target s/d Tahun 2024

Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023) (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	JUMLAH KESELURUHAN	9,540,173,127	8,981,622,127	94.15	10,805,800,747	10,805,800,747	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7,986,586,427	7,844,801,115	98.22	8,730,207,947	8,730,207,947	100.00
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	7,986,586,427	7,844,801,115	98.22	8,730,207,947	8,730,207,947	100.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,703,225,127	5,658,564,527	99.22	6,373,666,446	6,373,666,446	100.00
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4,560,924,527	4,526,655,559	99.25	5,134,859,166	5,134,859,166	100.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,560,924,527	4,526,655,559	99.25	5,134,859,166	5,134,859,166	100.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,560,924,527	4,526,655,559	99.25	17,850,000	17,850,000	100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4,560,924,527	4,526,655,559	99.25	17,850,000	17,850,000	100.00
	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	276,564,100	275,325,100	99.55	225,383,200	225,383,200	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,391,700	5,181,500	96.10	5,386,300	5,386,300	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	46,792,000	46,319,650	98.99	59,998,900	59,998,900	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,630,900	21,630,800	100.00	10,000,000	10,000,000	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201,936,500	201,380,150	99.72	149,998,000	149,998,000	100.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	813,000	813,000	100.00	-	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	720,889,000	709,260,356	98.39	50,069,400	50,069,400	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37,862,500	33,958,003	89.69	50,069,400	50,069,400	100.00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	683,026,500	675,302,353	98.87	734,639,680	734,639,680	100.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,862,500	33,958,003	89.69	53,893,680	53,893,680	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645,164,000	641,344,350	99.41	680,746,000	680,746,000	100.00
	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	182,710,000	181,281,515	99.22	210,865,000	210,865,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	107,020,000	106,731,249	99.73	111,511,000	111,511,000	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	37,700,000	37,181,450	98.62	35,504,000	35,504,000	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,990,000	7,720,000	96.62	23,850,000	23,850,000	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30,000,000	29,648,816	98.83	40,000,000	40,000,000	100.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1,490,474,780	1,430,303,173	95.96	1,172,802,050	1,172,802,050	100.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1,490,474,780	1,430,303,173	95.96	1,172,802,050	1,172,802,050	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	386,276,300	373,915,057	96.80	312,936,800	312,936,800	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	14,400,000	14,400,000	100.00	4,800,000	4,800,000	100.00
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	963,581,750	921,293,706	95.61	751,499,950	751,499,950	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	126,216,730	120,694,410	95.62	103,565,300	103,565,300	100.00
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	475,100,451	446,875,900	94.06	695,661,800	695,661,800	100.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100,200,000	75,083,050	74.93	346,406,400	346,406,400	100.00
	Penyediaan Permakanan	74,200,000	53,070,250	71.52	179,000,000	179,000,000	100.00
	Penyediaan Sandang				34,200,000	34,200,000	100.00
	Penyediaan Alat Bantu				70,987,200	70,987,200	100.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	25,000,000	21,021,600	84.09	44,323,000	44,323,000	100.00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1,000,000	991,200	99.12	17,896,200	17,896,200	100.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	374,900,451	371,792,850	99.17	349,255,400	349,255,400	100.00
	Penyediaan Permakanan	123,000,000	122,716,150	99.77	38,616,000	38,616,000	100.00
	Penyediaan Sandang	96,850,000	95,540,550	98.65	67,125,000	67,125,000	100.00
	Penyediaan Alat Bantu	1,000,000	1,000,000	100.00	8,945,000	8,945,000	100.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	63,800,000	63,631,500	99.74	135,896,800	135,896,800	100.00
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	90,250,451	88,904,650	98.51	98,672,600	98,672,600	100.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	217,192,750	216,694,915	99.77	323,111,100	323,111,100	100.00
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	217,192,750	216,694,915	99.77	323,111,100	323,111,100	100.00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75,644,050	75,524,650	99.84	83,007,000	83,007,000	100.00
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	141,548,700	141,170,265	99.73	226,685,100	226,685,100	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				13,419,000	13,419,000	100.00
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	79,343,319	73,597,600	92.76	142,596,551	142,596,551	100.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				71,585,000	71,585,000	100.00
	Penyediaan Makanan				26,850,000	26,850,000	100.00
	Penyediaan Sandang				26,840,000	26,840,000	100.00
	Pelayanan Dukungan Psikososial				17,895,000	17,895,000	100.00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	79,343,319	73,597,600	92.76	71,011,551	71,011,551	100.00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	79,343,319	73,597,600	92.76	71,011,551	71,011,551	100.00
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	21,250,000	18,765,000	88.31	22,370,000	22,370,000	100.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21,250,000	18,765,000	88.31	22,370,000	22,370,000	100.00
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	21,250,000	18,765,000	88.31	22,370,000	22,370,000	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	253,114,800	238,159,255	94.09	759,215,850	759,215,850	100.00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	198,506,000	185,296,955	93.35	179,370,700	179,370,700	100.00
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	45,400,000	45,336,350	99.86	54,151,100	54,151,100	100.00
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	45,400,000	45,336,350	99.86	54,151,100	54,151,100	100.00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota				14,991,200	14,991,200	100.00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				14,991,200	14,991,200	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	153,106,000	139,960,605	91.41	110,228,400	110,228,400	100.00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	153,106,000	139,960,605	91.41	110,228,400	110,228,400	100.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				201,778,450	201,778,450	100.00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				35,800,000	35,800,000	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				35,800,000	35,800,000	100.00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				48,078,450	48,078,450	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				48,078,450	48,078,450	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				117,900,000	117,900,000	100.00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				117,900,000	117,900,000	100.00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK (PHA)	51,619,800	49,873,300	96.62	166,762,900	166,762,900	100.00
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				64,006,300	64,006,300	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				64,006,300	64,006,300	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51,619,800	49,873,300	96.62	102,756,600	102,756,600	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,854,850	18,140,350	96.21	-	-	
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	32,764,950	31,732,950	96.85	102,756,600	102,756,600	100.00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2,989,000	2,989,000	100.00	211,303,800	211,303,800	100.00
	Pencegahan kekerasan Terhadap Anak Yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2,989,000	2,989,000	100.00	55,612,100	55,612,100	100.00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2,989,000	2,989,000	100.00	-	-	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				19,812,100	19,812,100	100.00
	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota				35,800,000	35,800,000	100.00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				155,691,700	155,691,700	100.00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				58,566,700	58,566,700	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				97,125,000	97,125,000	100.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1,300,471,900	898,661,757	69.10	1,316,376,950	1,316,376,950	100.00
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	20,042,000	18,935,890	94.48	98,449,700	98,449,700	100.00
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				35,799,750	35,799,750	100.00
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				35,799,750	35,799,750	100.00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20,042,000	18,935,890	94.48	62,649,950	62,649,950	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	Membentuk Rumah Data kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	20,042,000	18,935,890	94.48	62,649,950	62,649,950	100.00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	559,617,900	200,592,800	35.84	516,108,250	516,108,250	100.00
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	533,106,100	186,892,000	35.06	37,700,000	37,700,000	100.00
	Pengendalian Program KKBPK	194,356,100	186,892,000	96.16	37,700,000	37,700,000	100.00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB	338,750,000	299,319,277	88.36	-	-	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	26,511,800	13,700,800	51.68	-	-	
	Penguatan Peran Serta Organisasi kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	26,511,800	13,700,800	51.68	-	-	
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				231,350,000	231,350,000	100.00
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				231,350,000	231,350,000	100.00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				194,330,000	194,330,000	100.00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				194,330,000	194,330,000	100.00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				52,728,250	52,728,250	100.00
	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasayarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				52,728,250	52,728,250	100.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2018-2023)	Target dan Target Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Rp)	Perkiraan Target Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2024)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Target Anggaran Perangkat Daerah tahun 2023 (Rp)	Tingkat Target (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Target Renja Perangkat at Daerah tahun 2024)
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=7/6
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	720,812,000	679,133,067	94.22	701,819,000	701,819,000	100.00
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	720,812,000	679,133,067	94.22	99,305,000	99,305,000	100.00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKSS)	2,180,000	2,180,000	100.00			
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKSS)	494,177,050	492,489,999	99.66			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				2,180,000	2,180,000	100.00
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKSS)	224,454,950	184,463,068	82.18	97,125,000	97,125,000	100.00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				602,514,000	602,514,000	100.00
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				584,614,000	584,614,000	100.00
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				17,900,000	17,900,000	100.00

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, capaian kinerja tahun anggaran 2023 dapat terlaksana dengan baik

dengan 12 (Dua belas) program dengan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dan 73 (Tujuh Puluh Tiga) sub kegiatan. Ada 2 (dua) sub kegiatan yang tidak mencapai target keuangan 75% pada perubahan anggaran Tahun 2023, yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran sebesar Rp.74.200.000,- Sub Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Sosial Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Target fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan target anggaran sebesar Rp.53.070.250,- (71.52%). Hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi 306 orang warga yang terkena bencana banjir. Dan juga melaksanakan kegiatan penyelenggaraan dapur umum bagi korban bencana. Pada kegiatan ini juga disediakan administrasi berupa transpor untuk petugas TAGANA. Pelaksanaan kegiatan ini bersifat isidentil (apabila terjadi bencana) untuk pemenuhan Kebutuhan Gizi dasar (permakanan) korban bencana. Pemberian paket sembako berupa paket permakanan di berikan kepada korban bencana alam /sosial, sementara itu kebutuhan permakanan masyarakat yang terkena dampak bencana telah terpenuhi dari bantuan provinsi dan pusat (APBN).
- b. Sub Kegiatan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan anggaran sebesar Rp.26.511.800,- Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peranan organisasi masyarakat peduli KB dalam pengembangan program KKBPK di Kota Padang Panjang. Target fisik kegiatan ini mencapai 100% dengan target anggaran sebesar Rp.13.700.8000,- (51.68%). Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksanya pelatihan kader PPKBD sebanyak 2 kali kegiatan. Masalah kegiatan ini adalah tidak terlaksananya pencangan bulan bakti IBI bangga kencana kesehatan dan bulan bakti TNI bangga kencana kesehatan karena kegiatan ini telah terakomodir di kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metoda kontrasepsi jangka panjang (pelayanan KB dalam bulan bakti sosial).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Daerah di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan target indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran . Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang

INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Targer Renstra Perangkat Daerah				Target Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Angka PPKS			5.68	5.56	4.68	4.49	5.43	4.47	4.68	4.49	
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase korban bencana yang tertangani	SPM		100	100	100	100	100	100	100	100	
Persentase PPKS yang tertangani			69.82	65	80	82.5	69.82	92	80	82.5	
Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif			90	90	100	100	90	100	100	100	
Indeks Pemberdayaan Gender			69.44	83.1	71.44	73.05	69.44		71.44	73.05	

INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Targer Renstra Perangkat Daerah				Target Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Predikat KLA			Nindya	Nindya	Utama	Utama	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
Predikat APE			Pratama	Madya	Madya	Nindya	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	
Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar			79.85	75	83.5	87	79.85	75	83.5	87	
Prevalensi Stunting			16.80	15.50	14.00	12.60	25.42	15.03	14.00	12.60	
Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP kehidupan			66.73	100	70	72.5	50.91	88	70	72.5	
Indeks Pembangunan Keluarga			54.13	55.5	57.5	58.5	57.5	58.5	57.5	58.5	
Rata-rata jumlah anak perkeluarga			2.40	2.25	2.35	2.3	2.4	2.51	2.35	2.3	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan “Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial” memiliki indikator kinerja yaitu Angka PPKS tahun 2022 sebesar 5.43 % dan pada tahun 2023 sebesar 4.47 % . Artinya masyarakat yang termasuk kedalam kategori PPKS di kota Padang Panjang mengalami penurunan dalam jumlahnya. Persentase PPKS yang tertangani adalah 92 persen dengan Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif adalah 100 %. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti yang tertangani adalah 100 % dan Persentase korban bencana yang tertangani adalah 100 % , ini termasuk kedalam SPM yang berada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Padang Panjang;
2. Tujuan “ Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak dengan indicator Indeks Pemberdayaan Gender adalah dan Prediket KLA yang diraih pada tahun 2023 adalah Prediket Nindya dengan persentase indicator KLA yang terpenuhi sesuai standar adalah 75 persen. Prediket APE dalam meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak adalah Prediket Pratama;
3. Tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indicator prevalensi stunting pada tahun 2023 adalah sebesar 15.03 % dengan target sebesar 15.50 %. Pada tujuan ini terdapat sasaran meningkatny aksi percepatan penanganan keluarga beresiko stunting dengan indikatornya adalah persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HP Kelahiran pada tahun 2023 adalah 88 % , pada tahun 2022 sebesar 57.5 % ;
4. Tujuan meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB degan indikatornya adalah Serta indeks pembangunan keluarga sebesar 58.5 %. Sasaran pada tujuan ini adalah meningkatkanya pelayanan kepemndudukan dan keluarga berencana dengan indikatornya adalah rata – rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2023 adalah sebesar 2.51 dengan target 2.25

sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2.4.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai OPD yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah disadari bahwa Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal baik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan, antara lain :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan

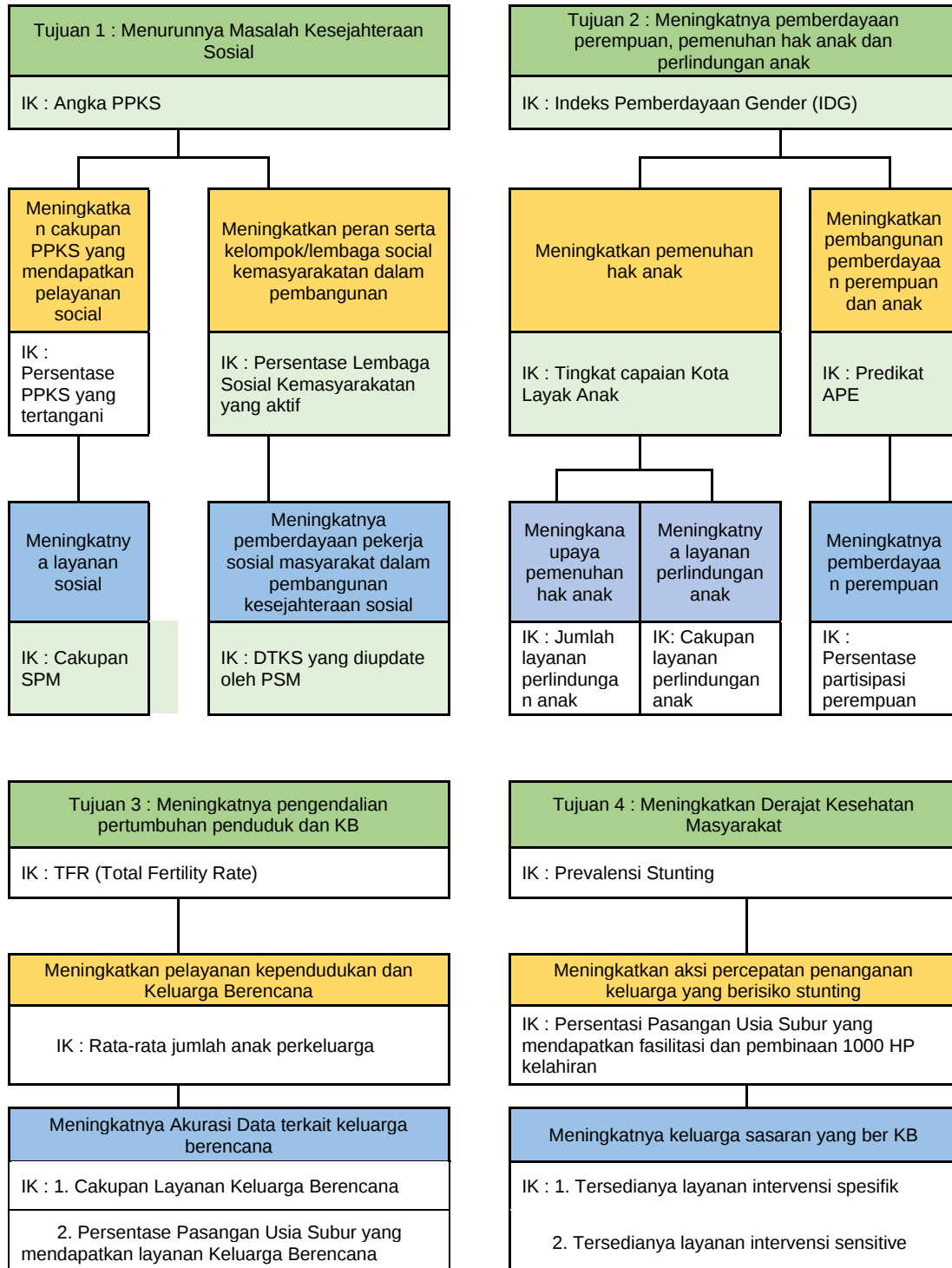
No	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Kemiskinan	Masih Tingginya Penduduk Miskin dan Rentan dengan StatusKesejahteraan Terendah di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi
2.	Ketelantaran	Masih banyaknya jumlah anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orangtua/keluarga
3.	Kedisabilitasan	Rendahnya aksesibilitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
4.	Korban Bencana	Tingginya resiko bencana alam dan non alam (Bencana Sosial) akibat rusaknya bentang alam dan kondisi geografis daerah kepulauan sepertibanjir,longsor, puting beliung, gelombang pasang dan konflik sosial (Non Alam)
5.	Tuna Sosial	Banyaknya permasalahan sosial tuna susila

No	Permasalahan	Isu Strategis
6.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Masih rendahnya kompetensi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial - Rendahnya kapasitas dan terbatasnya potensi Lembaga Kesejahteraan Sosial - Belum optimalnya peran dunia usaha dalam pengumpulan sumbangan dana sosial

Permasalahan belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara optimal menitik beratkan pada peningkatan pelayanan sosial yang difokuskan pada 6 kelompok sasaran permasalahan yaitu kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitas, korban bencana, tuna sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial.

Gambar 2.1

POHON MASALAH
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PADANG PANJANG



Pohon Kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan yang terdiri dari 4 tujuan dan beberapa Indikator Kinerja, yaitu : menurunkannya masalah kesejahteraan sosial, meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB.

Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana tabel tabel berikut:

Tabel 2.6
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. rendahnya pendapatan masyarakat

No	Isu Utama	Isu Strategis
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai lunturnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. layanan infrastruktur dasar b. kesesuaian pemanfaatan ruang c. kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap pembangunan Kota Padang Panjang, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

- a. Masih adanya PPKS yang belum memperoleh bantuan dan kurangnya anggaran yang tersedia untuk penanganan PPKS;
- b. Masih belum optimal peranan dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak;
- c. Masih rendahnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak
- d. Masih tingginya angka unmetneed;
- e. Belum semua PUS menyadari pentingnya 1000 HPK dalam pencegahan terjadinya stunting pada balita.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Dengan Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11,468,551,540	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11,262,351,545	1,436,588,764	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9,325,655,240	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9,119,455,245	1,432,561,464	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100 Persen	5,136,969,762	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100 Persen	6,568,907,022	1,431,937,260	
1	06	01	2.002		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4,055,930,882	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5,179,297,765	1,123,366,883	
1	06	01	2.002	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	4,055,930,882	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	5,179,297,765	560	
1	06	01	2.005		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 Persen	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0 Persen	0	-	
1	06	01	2.005	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	
1	06	01	2.006		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	327,916,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	336,048,245	8,132,045	
1	06	01	2.006	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,391,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,391,700	-	
1	06	01	2.006	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	65,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pada Panjang, Sumatera Kcamatan, Sumatera Kel/D	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	73,132,045	8,132,045	

Nomor					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	06	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,499,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,499,500	-		
1	06	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	233,025,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	233,025,000	-		
1	06	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	20,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	110,000,000	90,000,000		
1	06	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	110,000,000	90,000,000		
1	06	01	207		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	0 Unit	-	-		
1	06	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	522,181,680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	522,181,680	-		
1	06	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	53,893,680	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	53,893,680	-		
1	06	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	468,288,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	468,288,000	-		
1	06	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	210,941,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	421,379,332	210,438,332		

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
1	06	01	209	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111,525,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	256,379,332	144,854,332	
1	06	01	209	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	35,516,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	75,000,000	39,484,000	
1	06	01	209	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	23,900,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	50,000,000	26,100,000	
1	06	01	209	009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40,000,000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40,000,000	-	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1.299,684,600	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1,269,684,600	4,900	
1	06	02	203		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibangun	60 Lembaga	1,299,684,600	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibangun	60 Lembaga	1,269,684,600	4,900	
1	06	02	203	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	297,222,800	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	267,222,800	-	
1	06	02	203	002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8,640,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8,650,000	10,000	
1	06	02	203	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	900,000,000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	900,000,000	-	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
						Kel/Desa						Kel/Desa				
1	06	02	203	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	93,816,900	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	93,811,800	- 5,100	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen	1,049,911,699	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen	873,711,704	304	
1	06	04	201		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	676,199,995	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	500,000,000	-	
1	06	04	201	0001	Penyediaan Permakanaan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	376,199,995	Penyediaan Permakanaan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	200,000,000	-	
1	06	04	201	0002	Penyediaan Sandang	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	150,000,000	Penyediaan Sandang	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	150,000,000	-	
1	06	04	201	0003	Penyediaan Alat Bantu	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	80,000,000	Penyediaan Alat Bantu	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	80,000,000	-	
1	06	04	201	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000	-	
1	06	04	201	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	50 Orang	20,000,000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan, Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	50 Orang	20,000,000	-	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
					Pengemis dan Masyarakat		Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Pengemis dan Masyarakat		Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
1	06	04	202		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	373,711,400	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	373,711,704	304	
1	06	04	202	0003	Penyediaan Permakanan	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000	Penyediaan Permakanan	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000	-	
1	06	04	202	0004	Penyediaan Sandang	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000	Penyediaan Sandang	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000	-	
1	06	04	202	0005	Penyediaan Alat Bantu	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000	Penyediaan Alat Bantu	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000	-	
1	06	04	202	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120,000,000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120,000,000	-	
1	06	04	202	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	93,711,400	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	93,711,704	304	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 Persen	228,029,600	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	87,97 Persen	228,648,600	619,000	
1	06	05	202		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah	17 Layanan	228,029,600	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah	17 Layanan	228,648,600	619,000	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
							kabupaten/kota					kabupaten/kota				
1	06	05	2.002	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 orang	79,320,000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 orang	79,939,000	619,000	
1	06	05	2.002	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	133,709,600	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	133,709,600	-	
1	-	05	2.002	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	15,000,000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	15,000,000	-	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	153,503,319	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	153,503,319	-	
1	06	06	2.001		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	80,000,000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	80,000,000	-	
1	06	06	2.001	0001	Penyediaan Makanan	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000	Penyediaan Makanan	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000	-	
1	06	06	2.001	0002	Penyediaan Sandang	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000	Penyediaan Sandang	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000	-	
1	06	06	2.001	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	20,000,000	Pelayanan Dukungan Psikososial	- Kota Pada ng Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	20,000,000	-	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)			
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	73,503,319	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	73,503,319	-		
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	73,503,319	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	73,503,319	-		
							Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	0 unit				Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	0 unit		-		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	25,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	25,000,000	-		
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	25,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	25,000,000	-		
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	25,000,000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	25,000,000	-		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					-		
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					711,869,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					745,869,000	34,000,000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSU TAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	219,580,000	PROGRAM PENGARUSU TAMAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	253,580,000	34,000,000		
							Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen		-		
2	08	02	2.01		Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	40,000,000	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	74,000,000	34,000,000		
							Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD		-		
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	23 OPD	40,000,000	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	- Kota Padang Panjang, Sumatera Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan	23 OPD	74,000,000	34,000,000		

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
							Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota				
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	30,000,000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	30,000,000	-	
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	26 Lembaga	30,000,000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	26 Lembaga	30,000,000	-	
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	149,580,000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	149,580,000	-	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 Persen	149,532,000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 Persen	149,532,000	-	
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	30,000,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	30,000,000	-	
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	30,000,000	-	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	104,502,000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	104,502,000	-	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Utara Kecamatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 layanan	104,502,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Utara Kecamatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 layanan	104,502,000	-	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	10 Layanan	15,030,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota	10 Layanan	15,030,000	-	
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Utara Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15,030,000	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Utara Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyediaan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15,030,000	-	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 Persen	120,620,000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase indikator KLA yang terpenuhi	83 Persen	120,620,000	-	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	43,855,000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	35 Lembaga	43,855,000	-	
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Utara Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	43,855,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sumatera Utara Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	43,855,000	-	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase forum anak aktif	70 Persen	76,765,000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase forum anak aktif	70 Persen	76,765,000	-	
							Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	100 Persen		-	
							Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	100 Persen		-	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
2	08	06	2002	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	35 orang	76,765,000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	35 orang	76,765,000	-	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 persen	222,137,000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 persen	222,137,000	-	
2	08	07	2001		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	62,137,000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 persen	62,137,000	-	
2	08	07	2001	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	22,137,000	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	22,137,000	-	
2	08	07	2001	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	40,000,000	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	6 Dokumen	40,000,000	-	
2	08	07	2002		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	160,000,000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	160,000,000	-	
2	08	07	2002	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	40,000,000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	40,000,000	-	
2	08	07	2002	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	120,000,000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	- Kota Pada Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	120,000,000	-	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,427,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,397,027,300	-29,972,700	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 Persen	53,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan	100 Persen	53,000,000	-	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	23,000,000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 dokumen	23,000,000	-	
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25 Kegiatan	23,000,000	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	25 Kegiatan	23,000,000	-	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah data yang dikembangkan	16 unit	30,000,000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah rumah data yang dikembangkan	16 unit	30,000,000	-	
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	30,000,000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	30,000,000	-	
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	20,000,000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 laporan	0	- 20,000,000	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR	65%	278,880,000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase CPR	65%	248,907,500	- 29,972,500	
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2450	55,000,000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2450	55,030,000	30,000	
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	7 Dokumen	40,000,000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kematana, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	7 Dokumen	40,000,000	-	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Cat ata n Pen ting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an	Pagu Indikati f (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Targe t Capai an Kinerj a	Pagu Indikati f (Rp)		
							Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan					Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				
					Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder s dan Mitra Kerja	30 Organisasi	15,000,000	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder s dan Mitra Kerja	30 Organisasi	15,030,000	30,000	
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	167,880,000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	137,877,500	- 30,002,500	
					Penggerakan Kader Institusi masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 orang	30,000,000	Penggerakan Kader Institusi masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 orang	-	- 30,000,000	
2	14	03	2005		Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	137,880,000	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	137,877,500	- 2,500	
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50%	56,000,000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50%	56,000,000	-	
2	14	03	2004	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 organisasi	56,000,000	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/D esa	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 organisasi	56,000,000	-	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65%	1,095.120,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	65%	1,095.119,800	- 200	

Nomor					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Selisih
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibangun	114 Kelompok	552,560,000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibangun	114 Kelompok	846,481,800	293,921,800	
					Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS) (Orang)	223 kader	522,560,000	Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS) (Orang)	223 kader	562,135,000	39,575,000	
2	14	04	201	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	3 Laporan	30,000,000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	3 Laporan	284,346,800	254,346,800	
2	14	04	202		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100%	542,560,000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100%	248,638,000	-293,920,000	
2	14	04	202	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	23 Organisasi	522,560,000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPKS)	23 Organisasi	228,638,000	-293,920,000	
2	14	04	202	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Sumatera Kecamatan, Sumatera Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang dalam proses penyusunan perencanaan telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, yaitu melalui Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis.

Pada Musrenbang RKPD terdapat 1 (Satu) usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang Panjang dan terdapat 11 Pokok Pikiran Anggota Dewan DPRD Kota Padang Panjang yang telah diakomodir pada tahun 2025. Untuk beberapa usulan kegiatan yang tidak terakomodir karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/Subkegiatan		Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/Volume	Pagu Indikatif	Catatan
1	2		3	4	5	6	7
1	PROGRAM REHABILITAS SOSIAL		JL. SYECH M JAMIL RT 5 KELURAHAN KOTO PANJANG, Kota Padang Panjang	Persentase PPKS yang tertangani	1 Orang	15,000,000	
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		KAMPUNG TELENG NO 35 RT 12 KEL KAMPUNG MANGGIS, Kota Padang Panjang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1 Orang	17,450,000	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan		jl. anas karim sungai andok, RT.006, kel, kamoung manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	7,499,995	
4			Jl. H. Sumanik RT.1 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
5			Bukit kandung RT.9, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
6			Solok batuang RT.9 kel. Sigando, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,250,000	
7			Jl/ Muchtar Luthfi No.25 RT.11 Kel. Ngalau, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
8			Jl. Syech Ibrahim Musa RT.2 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
9			Bukit Kandung RT.9 kel. ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
10			tabek gadang RT.8 Kel. Ganting, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
11			Jl. Syech Ibrahim Musa No.31 RT.2 Kel. Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang		1 Orang	17,000,000	
		JUMLAH				176.199.995,-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan wujud pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan pembangunan dijabarkan dan ditunjukkan dengan jelas pada sasaran yang dirumuskan secara spesifik untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu untuk mewujudkan tujuan pembangunan sebagaimana dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah perlu dirumuskan berdasarkan kondisi, permasalahan, potensi serta dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dinamika dalam pembangunan daerah tidak hanya diperhatikan secara spasial, artinya tidak hanya memperhatikan dinamika di lingkup satu wilayah saja, melainkan juga dengan memperhatikan dinamika yang terjadi secara regional maupun nasional. Untuk itu dalam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah juga harus disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi dan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Penyusunan rencana Kerja Pemerintah (RKT) tahun 2025 dengan tema akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RKP 2025 ini diproyeksikan sebagai respons atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. KP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi

acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Kementerian PPN/Bappenas berharap RKP 2025 bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025–2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”***, dengan penjabaran misi, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		Menurunnya prevalensi stunting
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		Meningkatnya Daya Saing Masyarakat
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial		Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK
		Meningkatnya Budaya Literasi

Misi	Tujuan	Sasaran
kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)
		Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
		Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/ Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan
		Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah
		Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera
		Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sector
		Meningkatnya pertumbuhan Investasi
		Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi
		Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran
		Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian
		Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Meningkatnya kapabilitas birokrasi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam rangka mendukung program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu: ***"Peningkatan Daya Saing Daerah"***.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah serta nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan

secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 mengacu pada RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diterjemahkan kedalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Target dari tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025 dirumuskan dengan berdasarkan sasaran RPD 2024-2026, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, serta kebijakan pembangunan nasional tahun 2025. Berikut dijelaskan penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
1	Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia	78,78	78,97	79,02	79,38	79,73	79,73
		1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	11,92	11,93	11,94	11,96	11,98	11,98
				Harapan Lama Sekolah	15,07	15,08	15,09	15,10	15,11	15,11
		2	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Umur HarapanHidup	73,02	73,03	73,04	73,05	73,06	73,06
				Prevelansi Stunting	16,80	15,40	14,00	12,60	11,20	11,20
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan gender	69,44	70,84	71,44	73,05	74,06	74,06
				Predikat Kota Layak Anak	nindya	Nindya	utama	utama	utama	utama
		4	Meningkatnya daya saingk kepemudaan dan keolahragaan	Status Kota layak pemuda	-	-	Menuju Pratama	Menuju Pratama	Pratama	Pratama
				Rasio daya saing keolahragaan	-	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel			Indeks Reformasi Birokrasi	59,40	56,42	57,62	58,82	60,02	60,02

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
		5	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	62,91	63,10	63,98	64,86	65,74	65,74
				IPKD (Indek Pengelolaan Keuangan Daerah)	70,61	70,85	71,00	71,50	72,00	72
				Nilai Sistem Merit	Sangat Baik (325)	Sangat Baik (328)	Sangat Baik (330)	Sangat Baik (335)	Sangat Baik (340)	Sangat Baik (340)
				Maturitas SPIP	2+	2+	3 (3.1)	3 (3.2)	3 (3.3)	3 (3.3)
				Nilai penyelenggaraan pelayanan publik	85	88	90	93	95	95
				Indeks SPBE	2,09	2,40	2,70	2,85	3,00	3,00
3	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan	6	Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,39	4,79	5,20	5,60	6,00	6,00
				LPE sektor Perdagangan	5,28	5,82	6,36	6,90	7,44	7,44
				LPE sektor pertanian	5,54	5,59	5,64	5,69	5,74	5,74
				LPE sektor akomodasi makandan minum	10,47	10,71	10,95	11,19	11,43	11,43
		7	Meningkatnya investasi	Persentase pertumbuhan nilai investasi	6	6	6	6	100	100
				Tingkat kemiskinan	5,14	4,69	4,24	3,79	3,34	3,34
		8	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,84	4,72	4,60	4,48	4,36	4,36
				Pengeluaran per Kapita	11,15	11,228	11,328	11,378	11,453	11,453
		9	Meningkatnya Pendapatan masyarakat	Indeks Gini	0,296	0,294	0,292	0,290	0,288	0,288

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
4	Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis			Indeks Rasa Aman	Aman (86,04)	Aman (86,20)	Aman (86,39)	Aman (89,09)	Aman (91,78)	Aman (91,78)
		10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai adat budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Pemajuan Kebudayaan	65,42	68,00	71,00	74,00	77,00	77,00
				Persentase mesjid yang aktif melaksanakan aktifitas keagamaan	75	80	85	90	95	95
		11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Pelanggaran	100	100	100	100	100	100
				Ketentraman dan Ketertiban Umum						
		12	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial	Angka PPKS	5,68	4,87	4,68	4,49	4,30	4,30
5	Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	90,96	91,16	91,36	91,56	91,76	91,76
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,61	66,80	67-68	66,76	69-70	69-70
		13	Terbangunnya Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang Berkualitas	IKLI kePUan	89,66	89,86	90,06	90,26	90,46	90,46
				IKLI perkim	96,8	96,85	96,90	96,92	96,95	96,95
				IKLI perhubungan	96,62	96,69	96,76	96,83	96,90	96,90

No	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	Kondisi Awal (2022)	Outlook 2023	2024	2025	2026	Target Akhir Perencanaan
		14	Meningkatnya konsistensi penataan Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82	82,5	83	83,5	84	84
		15	Meningkatnya kualitas udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	46,07	46,5	45,75	46,5	47,25	47,25
				Indeks Kualitas Udara	91,29	91,5	90,05	90,10	90,15	90,15
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	57,00	57,50	58,00	58,0

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkontribusi untuk mewujudkan 2 (dua) Tujuan yang ada dalam RPD yaitu tujuan 1 (satu) dan tujuan 4 (empat). yaitu : “Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing”, dengan indikator prevalensi stunting, Indeks Pemberdayaan Gender, Prediket Kota Layak Anak dan tujuan 4 (empat) “Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tertanam dan agamis” dengan indikator Angka PPKS.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga teknis perencanaan, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Dengan adanya kontribusi tersebut, diharapkan dari aspek perencanaan dan aspek penelitian dan pengembangan, dapat diwujudkan bersama seluruh *stakeholder*.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Beberapa isu Strategis Nasional Tahun 2024, yaitu :

1. Keberlanjutan Sumber Daya Alam (Menipisnya Cadangan Minyak dan Gas);
2. Peningkatan Populasi Penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan;
3. Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi (rendahnya pertumbuhan ekonomi);
4. Transformasi struktural berjalan lambat :
 - a. Produktivitas rendah
 - b. Kualitas SDM tenaga Kerja Rendah;
5. Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital.

Target Pembangunan daerah Tahun 2025 : yaitu :

1. Tujuan1 adalah : terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing dengan indicator : indeks pembangunan manusia dengan target : 79,02 Indeks;
2. Tujuan 2 adalah : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan indicator : Indeks reformasi birokrasi : 57,62 indeks;
3. Tujuan 3 adalah terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing disertai dengan penurunan ketimpangan dengan indicator laju pertumbuhan ekonomi 5,52 %;
4. Tujuan 4 adalah : terwujudnya tatanan kehidupan social masyarakat yang tentran dan agamis dengan indicator : indeks rasa aman : 86,39 indeks (Aman);
5. Tujuan 5 adalah : terwujudnya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dengan indicator : indeks kualitas layanan infrastruktur (IKLI) 90,53 % dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) : 66,80 %.

Dari target pembangunan daerah tahun 2025 diatas, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang telah menetapkan pada Rencana Kerja (Renja) 2025 program/kegiatan priuntuk menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,99%.

2. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat

Rencana Strategik (RENSTRA) ini memiliki makna yang penting karena selain menjadi acuan dalam penetapan kebijakan dan perencanaan program juga menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi Program Kesejahteraan Sosial dalam rentang waktu tahun 2021 – 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa esensi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam konteks Pembangunan secara umum sangat penting dalam rangka implementasikan Undang undang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat yang masuk dalam kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti : (a) kemiskinan, (b) keterlantaran, (c) kecacatan, (d) keterpencilan), (e) ketunaan sosial, (f) penyimpangan perilaku, (g) korban bencana, (h) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang ditandai dengan derajat kemampuan keberfungsian sosialnya.

Rencana Strategis ini memuat tentang urgensi dan isu strategis, Tujuan dan Sasaran serta program serta rencana pencapaian target pembangunan

kesejahteraan sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan semua unsur penyelenggara kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kerjasamadan mensinergikan program-program pembangunan kesejahteraan sosial guna mendukung visi dan misi Gubernur Sumatera Barat **yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Pada Penyusunan Rentra ini disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagai warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat yang saat ini cenderung masih meningkat dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2021 – 2026, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan kesejahteraan sosial yang akan di- hadapi pada kurun waktu 2021 – 2026, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun 2021 – 2026. Tantangan eksternal yang dihadapi mencakup lingkungan regional dan nasional bahkan global. Disadari bahwa tantangan eksternal disadari bahwa bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial yang memerlukan perhatian lebih serius. Perkembangan lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan kehidupan sosial ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup dan gender, civil society, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sesuai Rencana Strategis tahun 2024 - 2026 yang ditetapkan yaitu :

1. Menurunnya masalah kesejahteraan sosial dengan indikator : angka PPKS 4.49 %.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dengan indikator IDG 73.05 dan prediket Kota Layak Anak Utama;
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator : persentase penurunan stunting dengan target 12.60 %;
4. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga 58.5 %.

Sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026, untuk mendukung capaian tujuan perangkat daerah ditetapkan beberapa sasaran strategis, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial dengan indikator persentase PPKS yang tertangani 82.5 % ;
2. Meningkatkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dengan indikator Predikat APE Nindya;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dengan indikator persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar 87 %;

4. Meningkatkan aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting dengan indikator persentase pasangan usia subur yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000HP Kelahiran dengan target 72.5 %;
5. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator Rata-rata jumlah anak perkeluarga dengan target 2,3.

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel. 3.5
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Opd
Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	SASARAN RPD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI EKSTISTING (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
(1)	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial		Angka PPKS	5.68	4.68	4.49	4.30
			Meningkatnya cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	69.82	80	82.5	85
			Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga sosial kemasyarakatan dalam pembangunan	Persentase lembaga sosial kemasyarakatan yang aktif	90	100	100	100
(2)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		1. Indeks Pemberdayaan Gender 2. Predikat KLA	(69.44) Nindya	(71,44) Utama	(73,05) Utama	(75,06) Utama
			Meningkatnya pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Predikat APE	Pratama	Madya	Nindya	Nindya
			Meningkatnya pemenuhan hak anak	Persentase indikator KLA yang terpenuhi sesuai standar	79.85	83.5	87	90
(3)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting	16.80	14.00	12.60	11.20

No	SASARAN RPD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI EKSISTENSI (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
			Meningkatnya aksi percepatan penanganan keluarga yang berisiko stunting	Persentasi Pasangan Usia Subur yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan 1000 HP kehidupan	66.73	70	72.5	75
(4)		Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk dan KB		Indeks Pembangunan Keluarga	54.13	57.5	58.5	60
			Meningkatnya pelayanan kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	2.40	2.35	2.3	2.25

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Penetapan Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- I. PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan 2 Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM : PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

- 1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- 4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

III. PROGRAM : REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan alata bantu
- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- 5) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- 1) Penyediaan Permakanan
- 2) Penyediaan Sandang
- 3) Penyediaan Alat Bantu
- 4) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- 5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM : PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pengelolaan Data Fakir Miskin
 - 1) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

V. PROGRAM : PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
 - 1) Penyediaan Permakanan
 - 2) Penyediaan Sandang
 - 3) Pelayanan Dukungan Psikososial
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
 - 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

VI. PROGRAM : PEMELIHARAAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
 - 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

VII. PROGRAM : PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMERDAYAAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
 - 1) Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

VIII. PROGRAM : PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkungan Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- IX. PROGRAM : PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- X. PROGRAM : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
 - 2) Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota
 2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- XI. PROGRAM : PENGENDALIAN PENDUDUK

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
 - 2) Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain
 - 3) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
3. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain

XII. PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 2) Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Penggerakan Kader Institusi masyarakat
 - 2) Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- 1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

XIII. PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)
 - 2) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pendanaan indikator dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Padang Panjang

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11,468.551.540					18,773,927,429
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9,325.297.765					15,048,058,429
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah		100 Persen	6,568,907,022			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah	100 Persen	12,498,134,410

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	5,179,297,765			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5,179,297,765
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pad ang Panj ang, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Des a	518 Orang/bulan	5,179,297,765	DAU		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518 Orang/bulan	5,179,297,765

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		0 Person	0			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	18,500,000
1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	37 paket	18,500,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah		100 Persen	336,048,245			Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 Persen	327,916,200
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5,391,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,391,700
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	73,132,045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	65,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
							Sem ua Kel/ Des a							
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Des a	4 Paket	24,499,500	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24,499,500
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Sem ua Kecamatan, Sem	24 Laporan	233,025,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	233,025,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
							ua Kel/ Des a							
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	110,000,000			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	530,000,000
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	5 Unit	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
							Des a							
1	06	01	2.07		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	- Kota Padang Panjang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	0 Unit	-	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1 Unit	500,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	522,181,680			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	522,181,680
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	53,893,680	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	53,893,680

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	468,288,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	468,288,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 Persen	421,379,332			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	210,941,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	256,379,332	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	111,525,000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	75,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	35,516,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	23,900,000
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	40,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif		80 Persen	1,299,684,600			Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif	80 Persen	1,269,679,700
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina		60 Lembaga	1,299,684,600			Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina	60 Lembaga	1,269,679,700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92 Orang	297,222,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang	267,222,800

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	8,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	8,640,000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/	60 Lembaga	900,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Lembaga	900,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
							Des a							
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Sertifikat	93,811,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	93,816,900

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		90 Persen	873,711,704			Persentase PPKS yang tertangani	90 Persen	873,711,400
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		750 Orang	500,000,000			Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	750 Orang	500,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459 Orang	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	459 Orang	200,000,000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	150,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Orang	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	80,000,000
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	20,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		2710 Orang	373,711,704			Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	2710 Orang	373,711,400

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	75,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	75,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Orang	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Orang	120,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	120,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	93,711,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	93,711,400
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		87,97 Persen	228,648,600			Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 Persen	228,029,600

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		17 Layanan	228,648,600			Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	17 Layanan	228,029,600
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2119 orang	79,939,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2119 KK	79,320,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1271 Keluarga	133,709,600	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1271 Keluarga	133,709,600
1	-	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	15,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	15,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani		100 Persen	153,503,319			Persentase korban bencana yang tertangani	100 Persen	153,503,319
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana		100 Persen	80,000,000			'Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana	100 Persen	80,000,000
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pad ang Panj ang, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Des a	300 Orang	30,000,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	30,000,000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	20,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	'Jumlah anggota TAGANA yang dibina		30 Orang	73,503,319			'Jumlah anggota TAGANA yang dibina	30 Orang	73,503,319
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	73,503,319	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	73,503,319

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
						Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA		0 unit				Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA	0 unit	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara		100 Persen	25,000,000			Persentase TMP yang dipelihara	100 Persen	25,000,000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara		98 Makam	25,000,000			Jumlah makam yang dipelihara	98 Makam	25,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Makam	25,000,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	98 Makam	25,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				745,869,000					711,869,000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif		100 Persen	253,580,000			Persentase organisasi perempuan yang aktif	100 Persen	219,580,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Ke gi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
						Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		20 Persen				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	20 Persen	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah		23 OPD	74,000,000			Jumlah OPD yang memiliki data terpilah	23 OPD	40,000,000
						Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		23 OPD				Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS	23 OPD	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	23 OPD	74,000,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	23 OPD	40,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota		50 Persen	30,000,000			Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	50 Persen	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	26 Lembaga	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	26 Lembaga	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus		100 persen	149,580,000			Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus	100 persen	149,580,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Dokumen	149,580,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15 Dokumen	149,580,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 Persen	149,532,000			Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 Persen	149,532,000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan		8 Lembaga	30,000,000			Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan	8 Lembaga	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	30,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100 Persen	104,502,000			Persentase kasus yang ditindaklanjuti	100 Persen	104,502,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 layanan	104,502,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 layanan	104,502,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		10 Layanan	15,030,000			Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota	10 Layanan	15,030,000
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Pad ang Panj ang, Sem ua Keca mata n, Sem ua Kel/ Des a	15 Dokumen	15,030,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	15,030,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Ke gi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi		83 Persen	120,620,000			Persentase indikator KLA yang terpenuhi	85 Persen	120,620,000
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA		35 Lembaga	43,855,000			Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA	40 Lembaga	43,855,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	43,855,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen	43,855,000
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif		70 Persen	76,765,000			Persentase forum anak aktif	80 Persen	76,765,000
						Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA		100 Persen				Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA	70 Persen	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
						Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA		100 Persen				Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA	70 Persen	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	35 orang	76,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Anak	76,765,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 persen	222,137,000			Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	100 persen	222,137,000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti		100 Persen	62,137,000			Persentase kasus yang ditindak lanjuti	100 Persen	62,137,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	10 Orang	22,137,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	22,137,000
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	6 Dokumen	40,000,000	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	4 Dokumen	40,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani		100 Persen	160,000,000			Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani	100 Persen	160,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	40,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	12 Orang	40,000,000
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	120,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	12 Orang	120,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,397,027,300					1,497,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan		100 Persen	53,000,000			Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan	100 Persen	53,000,000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan		1 dokumen	23,000,000			Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan	1 Dokumen	23,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padang Panjang, Sem ua Kecamatan, Sem ua Kel/ Desa	25 Kegiatan	23,000,000	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	30 Kegiatan	23,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan		16 unit	30,000,000			Jumlah rumah dataku yang dikembangkan	16 Unit	50,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	16 Unit	30,000,000
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	0			Jumlah Laporan Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	12 laporan	20,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Ke gi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR		65%	248,907,500			Persentase CPR	67 Persen	278,880,000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		2450	55,030,000			Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif	2480	#REF!

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Dokumen	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	7 Dokumen	40,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 Organisasi	15,030,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	30 Organisasi	15,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		99 orang	137,877,500			Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina	99 orang	167,880,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
					Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 orang	-			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	88 orang	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Organisasi	137,877,500	PEND APAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	40 Organisasi	137,880,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50%	56,000,000			Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	50%	56,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 organisasi	56,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	3 Organisasi	56,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga		65%	1,095,119,800			Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga	67 Persen	1,165,120,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		114 Kelompok	846,481,800			Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	114 Kelompok	100,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
					Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS) (Orang)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	223 kader	562,135,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UppKS) (Orang)	223 kader	522,560,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	284,346,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	3 Laporan	100,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		100%	248,638,000			Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB	100 Persen	542,560,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	23 Organisasi	228,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Organisasi	522,560,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Ca t.	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Lok asi Out put Kegi atan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumb er Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)	(8)	(9)	(10)	11
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Sum u a Keca mata n, Sem ua Kel/ Des a	1 Lpaoran	20,000,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	20,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025. Secara umum Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas menkoordinasikan pencapaian 2 (dua) indikator tujuan yaitu : “Terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing” dan “Terwujudnya infrastruktur dan Lingkungan hidup yang berkualitas”;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang

berlaku.

8. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				11,468,551,540					17.725.427.429
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				9,325,297,765					13.999.558.429
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada perangkat daerah		100 Persen	6,568,907,022				100 Persen	11.479.634.429
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	5,179,297,765				100 persen	5,179,297,765
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	518 Orang/bulan	5,179,297,765	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		518 Orang/bulan	5,179,297,765
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	336,048,245				100 Persen	327,916,200
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	5,391,700	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		4 Paket	5,391,700

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	73,132,045	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		4 Paket	65,000,000
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	24,499,500	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		4 Paket	24,499,500
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	233,025,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		24 Laporan	233,025,000
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	110,000,000				100 Persen	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	110,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		5 Unit	30,000,000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	522,181,680				100 Persen	522,181,680

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	53,893,680	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		3 Laporan	53,893,680
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	468,288,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		4 Laporan	468,288,000
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 Persen	421,379,332				100 Persen	210,941,000
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Unit	256,379,332	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		21 Unit	111,525,000
1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27 Unit	75,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		27 Unit	35,516,000
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	50,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan		55 Unit	23,900,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										dan Berkeadilan	huan, terampil			
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	40,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		6 Unit	40,000,000
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentasi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial yang aktif		80 Persen	1,299,684,600				80 Persen	1,269,679,700
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina		60 Lembaga	1,299,684,600				60 Lembaga	1,269,679,700
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	92 Orang	297,222,800	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		92 Orang	267,222,800
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	8,650,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		2 Orang	8,640,000
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Lembaga	900,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		60 Lembaga	900,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Sertifikat	93,811,800	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		5 Sertifikat	93,816,900
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		90 Persen	1,049,911,699				90 Persen	873,711,400
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		750 Orang	676,199,995				750 Orang	500,000,000
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	459 Orang	376,199,995	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		459 Orang	200,000,000
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	150,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		75 Orang	150,000,000
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22 Orang	80,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		22 Orang	80,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	50,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		50 Orang	50,000,000
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	20,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		50 Orang	20,000,000
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti		2710 Orang	373,711,704				2710 Orang	373,711,400
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	75,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		75 Orang	75,000,000
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang	75,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		75 Orang	75,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	10,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		5 Orang	10,000,000
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	120,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		30 Orang	120,000,000
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	93,711,704	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		10 Dokumen	93,711,400
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial		87,97 Persen	228,648,600				90 Persen	228,029,600
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan data yang mendukung pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota		17 Layanan	228,648,600				17 Layanan	228,029,600
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2119 orang	79,939,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		2119 KK	79,320,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1271 Keluarga	133,709,600	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		1271 Keluarga	133,709,600
1	-	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130 Orang	15,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		130 Orang	15,000,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani		100 Persen	123,503,319				100 Persen	123,503,319
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase pemenuhan makanan, sandang dan dukungan psikososial kepada korban bencana		100 Persen	50,000,000				100 Persen	50,000,000
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	30,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		300 Orang	30,000,000
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Orang	20,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		300 Orang	20,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah anggota TAGANA yang dibina		30 Orang	73,503,319				30 Orang	73,503,319
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	73,503,319	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		30 Orang	73,503,319
						Pemeliharaan dan rehap bangunan markas komando TAGANA		0 unit		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		0 unit	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang dipelihara		100 Persen	25,000,000				100 Persen	25,000,000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang dipelihara		98 Makam	25,000,000				98 Makam	25,000,000
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98 Makam	25,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		98 Makam	25,000,000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				745,869,000					711,869,000
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi perempuan yang aktif		100 Persen	253,580,000				100 Persen	219,580,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD		20 Persen					20 Persen	
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memiliki data terpilah		23 OPD	74,000,000				23 OPD	40,000,000
						Jumlah OPD yang menyusun GAP dan GBS		23 OPD					23 OPD	
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 OPD	74,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		23 OPD	40,000,000
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan partai politik yang memperoleh advokasi dan pendampingan kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota		50 Persen	30,000,000				50 Persen	30,000,000
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Lembaga	30,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		26 Lembaga	30,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang telah mengikuti sosialisasi tentang penanganan kasus		100 persen	149,580,000				100 persen	149,580,000
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	149,580,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		15 Dokumen	149,580,000
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 Persen	149,532,000				100 Persen	149,532,000
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang mendukung perlindungan perempuan		8 Lembaga	30,000,000				8 Lembaga	30,000,000
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	30,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		6 Dokumen	30,000,000
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	Persentase kasus yang ditindaklanjuti		100 Persen	104,502,000				100 Persen	104,502,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 layanan	104,502,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		12 layanan	104,502,000
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/ Kota		10 Layanan	15,030,000				10 Layanan	15,030,000
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	15,030,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		15 Dokumen	15,030,000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase indikator KLA yang terpenuhi		83 Persen	120,620,000				85 Persen	120,620,000
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam PHA		35 Lembaga	43,855,000				40 Lembaga	43,855,000
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Dokumen	43,855,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		15 Dokumen	43,855,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak aktif		70 Persen	76,765,000				80 Persen	76,765,000
						Persentase lembaga pendidikan yang telah mengembangkan SRA		100 Persen					70 Persen	
						Persentase lembaga kesehatan yang telah mengembangkan PRA		100 Persen					70 Persen	
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 orang	76,765,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		35 Anak	76,765,000
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan dan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu		100 persen	222,137,000				100 persen	222,137,000
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang ditindak lanjuti		100 Persen	62,137,000				100 Persen	62,137,000
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	22,137,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		10 Orang	22,137,000
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan,	6 Dokumen	40,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	40,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
							Semua Kel/Desa			Yang Berkualitas dan Berkeadilan	yang sehat, berpengetahuan, terampil			
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase monitoring dan evaluasi kasus yang telah ditangani		100 Persen	160,000,000				100 Persen	160,000,000
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	40,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		12 Orang	40,000,000
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Orang	120,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		12 Orang	120,000,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1,397,027,300					1,497,000,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan Dokumen Kependudukan sebagai bahan perencanaan		100 Persen	53,000,000				100 Persen	53,000,000
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang dihasilkan		1 dokumen	23,000,000				1 Dokumen	23,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	02	2.01	0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Kegiatan	23,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		30 Kegiatan	23,000,000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dataku yang dikembangkan		16 unit	30,000,000				16 Unit	50,000,000
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Unit	30,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		16 Unit	30,000,000
					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 laporan	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		12 laporan	20,000,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR		65%	248,907,500				67 Persen	278,880,000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KB Baru dan Pembinaan Peserta KB Aktif		2450	55,030,000				2480	#REF!

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	40,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		7 Dokumen	40,000,000
					Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Organisasi	15,030,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		30 Organisasi	15,000,000
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB, Kader IMP yang dibina		99 orang	137,877,500				99 orang	167,880,000
					Penggerakan Kader Institusi masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 orang	-	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		88 orang	30,000,000
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Organisasi	137,877,500	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		40 Organisasi	137,880,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		50%	56,000,000				50%	56,000,000
2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 organisasi	56,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		3 Organisasi	56,000,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan Ketahanan Keluarga		65%	1,095,119,800				67 Persen	1,165,120,000
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		114 Kelompok	846,481,800				114 Kelompok	100,000,000
					Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/PPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	223 kader	562,135,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		223 kader	522,560,000
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	284,346,800	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan		3 Laporan	100,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prioritas Daerah	Kelompok sasaran	Rencana Tahun 2026	
							Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prioritas Nasional			Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)				dan Berkeadilan	huan, terampil			
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam program kampung KB		100%	248,638,000				100 Persen	542,560,000
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23 Organisasi	228,638,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		23 Organisasi	522,560,000
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil		1 Laporan	20,000,000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen penting dalam rangka mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyusunan Renja seharusnya mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Semua itu akhirnya menuju pada proses menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya berkaitan langsung kepada masyarakat, sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun anggaran 2025. Perencanaan program dan kegiatan tersebut memperhatikan dan menganalisis isu-isu penting dalam pembangunan yang patut ditindaklanjuti. Selanjutnya, penyusunan program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2025. Ketersediaan anggaran sesuai dengan pagu indikatif memerlukan komitmen semua pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Namun hal ini bukan suatu kemutlakan, tentunya disesuaikan pula dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah serta ketersediaan dana.

Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang Tahun 2025 yang dilengkapi dengan indikator serta target pencapaian kinerja akan menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang selama tahun 2025. Terlaksananya Renja Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang sesuai

dengan indikator dan target pencapaian kinerja tergantung kepada koordinasi dan komitmen seluruh pihak terkait pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 5 Agustus 2024

**Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Padang Panjang**



**Drs. Osman Bin Nur, M.Si
Nip. 106801201998021001**